

Relevansi Aspek Kemiskinan dan Fisik Lingkungan Kumuh Pada Penentuan Lokasi Penerima Program KOTAKU (Studi Kasus Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)

Jurnal Pengembangan Kota (2017)

Volume 5 No. 2 (131-139)

Tersedia online di:

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

DOI: 10.14710/jpk.5.2.131-139

Lia Andriana^{*}, Asnawi Manaf

Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Diponegoro

Abstrak. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, serta keterbatasan terhadap akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi yang baik serta perumahan yang layak huni. Hal tersebut yang menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh. Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu kabupaten yang mendapatkan program KOTAKU dengan 7 (tujuh) kelurahan/desa yang menjadi prioritas penanganan untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan permukiman yang baik dan sehat. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji apakah ada relevansi antara kemiskinan dan permukiman kumuh pada lokasi penerima program KOTAKU di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi, yakni metode penelitian kualitatif menggunakan deskriptif kualitatif dan metode penelitian kuantitatif menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) dengan metode *overlay*. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan sebaran kawasan kumuh yang nantinya dapat membantu pemerintah dan *stakeholder* terkait dalam mengambil keputusan guna merencanakan penataan kawasan perumahan dan permukiman kumuh.

Kata kunci: kemiskinan; permukiman kumuh; program KOTAKU; Sistem Informasi Geografi (SIG)

[Title: Relevance of Poverty and Physical Aspects of Slum Environment on Determining the location of KOTAKU Program (Case Study: Subdistrict Pamekasan, Pamekasan Regency)]. Poverty causes one unable to meet basic needs, as well as limited access to education, health, clean water, good sanitation and decent housing. This is the cause of the emergence of slums. Kabupaten Pamekasan as one of the districts that get KOTAKU program with 7 (seven) villages which become priority handling to realize improvement of quality of life of poor society through arrangement of good and healthy settlement. The purpose of this study is to examine whether there is relevance between poverty and slum settlement at the receiving location of KOTAKU program in Pamekasan sub-district of Pamekasan Regency. This study uses mixed methods where qualitative research methods using descriptive qualitative and quantitative research methods using Geographic Information Systems (GIS) with overlay method. The results of this study are expected to illustrate the distribution of slum areas that will help the government and related stakeholders in making decisions to plan the settlement of residential areas and slums.

Keyword: poverty; slums; KOTAKU Program; Geographic Information System (GIS)

Cara mengutip: Andriana, L., & Manaf. A. (2017). Relevansi Aspek Kemiskinan dan Fisik Lingkungan Kumuh Pada Penentuan Lokasi Penerima Program KOTAKU (Studi Kasus : Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan). **Jurnal Pengembangan Kota**. Vol 5 (2): 131-139. DOI: 10.14710/jpk.5.2.131-139

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Kabupaten Pamekasan khususnya Kecamatan Pamekasan merupakan masalah yang kompleks dan belum bisa terselesaikan, sehingga dalam penanganannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga dibutuhkan kerjasama antara pihak swasta, dan

ISSN 2337-7062 (print), 2503-0361 (online) © 2017

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2017

*Email: liandriana84@gmail.com, 082338110888

Diterima 21 September 2017, disetujui 30 November 2017

masyarakat. Menurut (Liu, Liu, & Zhou, 2017), kemiskinan adalah tantangan yang dihadapi semua negara dan masyarakat internasional secara keseluruhan.

Churchill dan Smyth (2017) menyatakan bahwa mengatasi kemiskinan adalah salah satu masalah yang paling mendesak yang dihadapi negara berkembang. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, sehingga peran TNP2K sebagai basis data terpadu dapat mereferensi penetapan sasaran bagi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Handler dan Hasenfeld (2006) mendefinisikan kemiskinan sebagaimana rumusan berikut: ada dua pendekatan berbeda dalam melihat konsep kemiskinan. Pertama, pendekatan ekonomi yang fokus pada identifikasi pendapatan untuk membeli sekeranjang barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan minimal. Kedua, pendekatan sosial yang terkait dengan tidak hanya pemenuhan aspek materi, tapi juga kemampuan untuk dapat berpartisipasi secara optimal sebagai anggota masyarakat. Pendekatan sosial ini didasarkan pada prinsip moral, bahwa setiap orang harus dapat memanfaatkan beragam sumber untuk mengembangkan kapasitas mereka dan mendapatkan kepuasan serta kehidupan yang produktif. Madanipour, Shucksmith, dan Talbot (2015) menyatakan bahwa kemiskinan dan pengucilan sosial sangat berkaitan erat dengan keadaan ekonomi masyarakat.

Fenomena kemiskinan di perkotaan dan perdesaan tidak terlepas dari lapisan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhannya. Sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka hanya memprioritaskan kebutuhan primer (pangan) untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki keterbatasan terhadap akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi yang baik serta perumahan yang layak huni. Kemiskinan terjadi karena orang miskin tidak memiliki akses sebagai sumber pendapatan, juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka peluang bagi orang

miskin untuk keluar dari lingkungan kemiskinan yang tidak berujung pangkal (Mubyarto, 2003).

Permukiman kumuh dapat timbul karena beberapa hal, seperti kondisi bangunan yang tidak layak huni akibat kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memadai, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu memiliki bangunan rumah yang layak. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi pada kawasan permukiman kumuh mengindikasikan bahwa masyarakat tidak mampu untuk 'membeli' lahan yang lebih memadai untuk membangun hunian. Salah satu dampak dari tingkat kepadatan bangunan yang tinggi ialah sarana dan prasarana dasar permukiman yang ada tidak mampu menjangkau seluruh kawasan permukiman.

Menurut UN-Habitat (2004) faktor-faktor yang menyebabkan kawasan menjadi kumuh di antaranya adanya migrasi penduduk dari desa ke kota, urbanisasi, dan kombinasi urbanisasi dan migrasi sebagai akibat dari perpindahan konflik antarpenduduk. Turok dan Borel-Saladin (2016) menyatakan bahwa di banyak negara, populasi kumuh yang sedang tumbuh ini mencerminkan pertumbuhan alami dan juga migrasi masuk. Pengaruh urbanisasi menjadi salah satu faktor penyebab kekumuhan. Banyak masyarakat perdesaan migrasi ke perkotaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, selain itu pembangunan yang terus dilakukan menjadikan ketimpangan antara desa dan kota. Rencana pembangunan yang tidak memperhatikan tentang isu marginalisasi terhadap kaum miskin di kota-kota seringkali menyebabkan eksklusi spasial mereka (K. Singh, 2014). Ramadhan dan Pigawati (2014) menuliskan bahwa tingkat kekumuhan kawasan permukiman dapat dilihat dari kondisi bangunan, aksesibilitas, prasarana, status tanah, kondisi kependudukan, dan kondisi sosial ekonomi.

Orang miskin dan penghuni permukiman kumuh identik orang yang sama di perkotaan. D'souza (1979) menekankan dua aspek masalah kemiskinan dan kekumuhan. Pertama, orang miskin dan penduduk kumuh menempati anak tangga terendah dalam hierarki sosial. Kedua, status sosial mereka diwariskan secara sosial dan bersifat abadi.

Perkembangan ini bergulir secara dinamis seiring dengan berjalannya waktu hingga memunculkan pusat-pusat kegiatan baru yang teraglomerasi terhadap perkembangan permukiman. Sebagaimana kawasan perkotaan di Indonesia pada umumnya, Kabupaten Pamekasan juga memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi dimana salah satunya adalah kawasan kumuh.

Pada tahun 1969, Jakarta dan Surabaya sudah melaksanakan program peningkatan permukiman kumuh melalui program *Kampung Improvement Program (KIP)* yang menjadi contoh dan banyak ditiru oleh kota dan negara lain yang menjadi lebih besar dan berhasil. Winayanti dalam tulisannya menyatakan bahwa di Jakarta lebih dari 500 kampung yang meliputi 3.8 juta penduduk diperbaiki melalui KIP (Winayanti & Lang, 2004). Namun kritik utama terhadap KIP di Jakarta adalah lokasi yang sudah diperbaiki justru menjadi sasaran pengembangan pusat bisnis. Harga tanah meningkat setelah KIP dan menjadikan proyek pengembangan pusat bisnis menjadi sangat mahal.

Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk mewujudkan *zero* kumuh di tahun 2019 sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019, maka melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pendampingan melalui Program NSUP (*Nasional Slum Upgrading Program*) atau Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan program KOTAKU dengan 7 (tujuh) kelurahan/desa yang menjadi prioritas penanganan (Tabel 1) dalam kategori peningkatan sesuai dengan SK Kumuh berdasarkan keputusan Bupati Pamekasan No. 188/545/432.131/2015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Pemerintah Kabupaten Pamekasan, 2015).

Tabel 1. Lokasi Penerima Program KOTAKU (Pemerintah Kabupaten Pamekasan, 2015).

No	Nama Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Baru Rambat	Pamekasan	Baru Rambat	26.35
2	Gladak Anyar	Pamekasan	Gladak Anyar	5.58
3	Jungcangcang	Pamekasan	Jungcangcang	10.09

No	Nama Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
4	Nyalabu Daya	Pamekasan	Nyalabu Daya	10.41
5	Panempan	Pamekasan	Panempan	5.82
6	Parteker	Pamekasan	Parteker	1.44
7	Patemon	Pamekasan	Patemon	1.22
Total Luas				60.91

KOTAKU sebagai program pemerintah yang menangani permukiman kumuh memiliki tujuan untuk mewujudkan perbaikan hidup masyarakat miskin dengan penataan permukiman yang baik dan sehat, melihat 7 kelurahan/desa yang masuk dalam SK Kumuh peneliti belum melihat sinkronisasi antara program penanggulangan kemiskinan dan program penanganan permukiman kumuh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil sebuah fenomena mengenai kemiskinan dan permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Pamekasan, sebagai salah satu kecamatan yang mendapat program KOTAKU. Untuk melakukan proses penelitian maka digunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*).

Pada penelitian ini menggunakan metode kombinasi model *sequential exploratory* yaitu metode penelitian yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan, dimana pada tahap pertama menggunakan metode penelitian kualitatif dan pada tahap kedua menggunakan metode kuantitatif. Metode dengan model ini digunakan untuk menemukan hipotesis dan sekaligus membuktikan validitas eksternal hipotesis tersebut (Sugiyono, 2012).

Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau jawaban pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Sedangkan untuk metode penelitian kuantitatif menggunakan analisis secara spasial dengan metode *overlay*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa Penyebab Kekumuhan di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Kumuh merupakan lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas secara fisik, ekonomi, budaya, dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Permukiman kumuh mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas, dimana permukiman kumuh banyak berkembang di perkotaan baik kota kecil maupun kota besar, dengan direncanakan ataupun tidak direncanakan. Seiring dengan adanya fenomena urbanisasi yang terjadi saat ini, merupakan salah satu penyebab timbulnya peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali di suatu wilayah perkotaan, dengan semakin berkembangnya suatu kota maka menjanjikan bagi para kaum urban untuk mencari kehidupan yang lebih baik tanpa memperhatikan lingkungan dimana mereka tinggal. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh narasumber dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berikut.

« di mana daerah-daerah kumuh ini terdapat pada lokasi-lokasi yang padat penduduknya, yang juga disebabkan oleh tingkat urban yg begitu besar » (AA/05-01-2018/34-36)

Tingkat urban yang terjadi di Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh perpindahan orang desa ke kota untuk mengadu nasib mencari kehidupan yang lebih layak. Kedatangan mereka dengan keadaan kekurangan mengakibatkan mereka hidup dengan kondisi seadanya, tidak peduli terhadap lingkungan, pola hidup tidak sehat, dan yang terpenting bagi mereka adalah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Hal ini yang mengakibatkan munculnya permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Pamekasan. Sesuai dengan pernyataan narasumber dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti berikut.

« Kekurang-sadarnya pemahaman masyarakat yang berada dalam lokasi kumuh tersebut tentang pola hidup bersih dan ketidak berdayaannya mereka dalam usaha pengetasan kekumuhan » (AD/05-01-208/40-43)

Dalam hal ini dapat terlihat bahwa kondisi lingkungan berpengaruh terhadap penyebab kekumuhan pada masyarakat. Selain itu, masalah ekonomi tidak kalah penting. Menurut pernyataan narasumber sudah tersirat bahwa permukiman kumuh yang terjadi berbanding lurus pada kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam aspek ekonomi. Didukung oleh pendapat narasumber dari konsultan program KOTAKU berikut.

« Kemiskinan berkorelasi dengan kekumuhan sehingga permukiman kumuh pada umumnya berada di lingkungan masyarakat dengan penghasilan rendah » (MA/09-01-2018/24-26)

Berdasarkan pernyataan beberapa narasumber, dapat diketahui bahwa munculnya permukiman kumuh disebabkan oleh peningkatan kaum urban yang cukup besar, dengan kondisi perekonomian yang rendah mengakibatkan pola hidup mereka yang kurang bersih dan tidak peduli dengan lingkungan tempat tinggal (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Kondisi permukiman kumuh di Kecamatan Pamekasan

3.2 Identifikasi Persebaran Masyarakat Miskin di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Identifikasi persebaran masyarakat miskin yang biasa disebut juga masyarakat kurang mampu di 7 kelurahan/desa penerima program KOTAKU Kecamatan Pamekasan dilakukan dengan melihat persebaran dari kepala rumah tangga miskin sesuai dengan status kesejahteraan pada Data Terpadu

Program Penanganan Fakir Miskin dalam (lihat Tabel 2) (TNP2K, 2017).

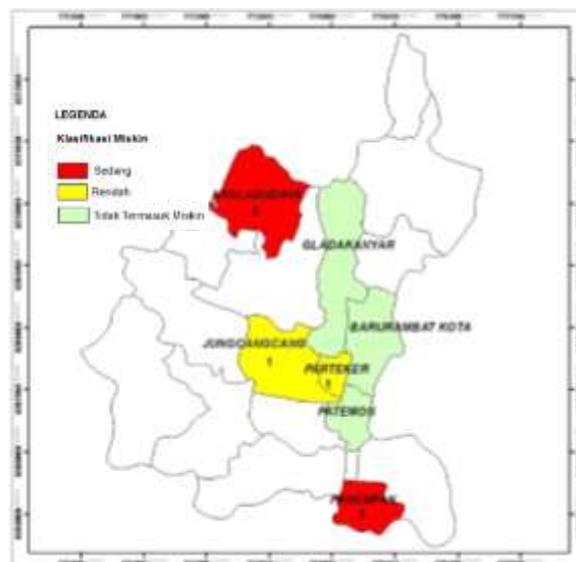
Tabel 2. Persentase Kepala Rumah Tangga Miskin (TNP2K, 2017)

Kelurahan	Jumlah Kepala Rumah Tangga*	Jumlah Kepala Rumah Tangga Miskin*	Persentase Kepala Rumah Tangga Miskin
Baru Rambat	1315	508	26.35
Gladak Anyar	880	220	5.58
Jungcangcang	1322	262	10.09
Nyalabu Daya	626	406	10.41
Panempan	2560	525	5.82
Parteker	510	276	1.44
Patemon	917	122	1.22
Jumlah Total	8130	2319	

Pada analisa pengidentifikasian persebaran masyarakat miskin yang didasarkan pada persentase Kepala Rumah Tangga Miskin, kemudian dilakukan penentuan status tingkat kemiskinan (mengadopsi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh). Dalam hal ini, kriteria tingkatan miskin dibagi berdasarkan 3 kriteria, meliputi:

- Miskin Tinggi = 76% - 100%
- Miskin Sedang = 51% - 75%
- Miskin Rendah = 25% - 50%

Setelah dilakukan identifikasi persebaran masyarakat miskin pada setiap kelurahan/desa, kemudian dilakukan analisa secara spasial dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan *software* ArcGIS 10.3 (lihat Gambar 2). Dengan memanfaatkan aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan terkait lokasi, kondisi, dan tren/pola/model. Dengan memanfaatkan pengelolaan informasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat menunjukkan bahwa solusi yang ditargetkan untuk pengurangan kemiskinan dan pembangunan dapat dicapai melalui perkawinan partisipasi masyarakat, kemauan politik dan teknologi yang *user-friendly* (R. Singh, 2016), sedangkan Gregory dan Healey (2007) menganggap kemampuan SIG lebih baik dianggap sebagai teknologi database.



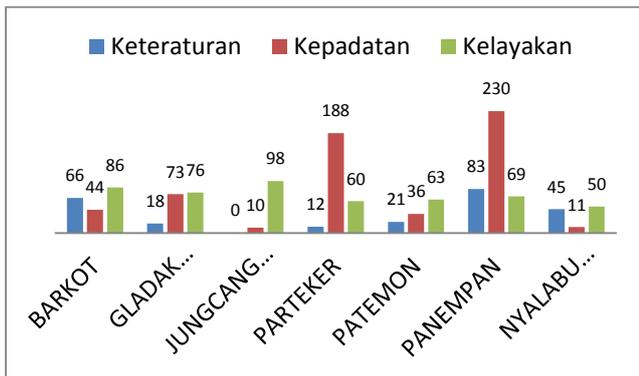
Gambar 2. Peta Persebaran KK Miskin di Kelurahan/Desa Penerima Program KOTAKU Kecamatan Pamekasan

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa Desa Nyalabu Daya dan Desa Panempan masuk kategori miskin sedang, sedangkan Kelurahan Jungcangcang dan Kelurahan Parteker masuk kategori miskin rendah, untuk tiga Kelurahan Patemon, Kelurahan Gladak Anyar dan Kelurahan Barurambat Kota tidak masuk kategori miskin.

3.3 Identifikasi Persebaran Permukiman Kumuh di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Identifikasi persebaran permukiman kumuh diperoleh melalui hasil survei masyarakat terkait dengan kondisi permasalahan 7 indikator kumuh, selengkapnya akan disajikan dalam bentuk diagram batang dan peta permasalahan permukiman di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

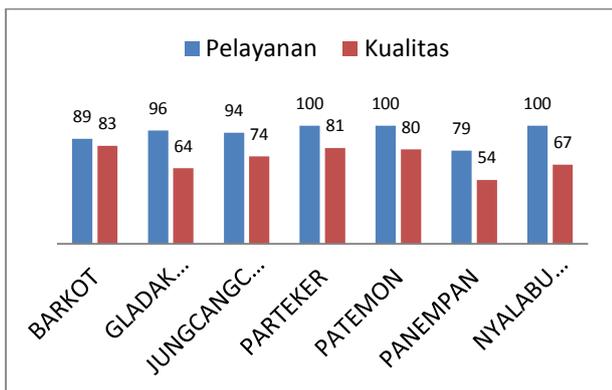
- a. Analisa Bangunan Hunian
Analisa bangunan hunian dipengaruhi oleh 3 sub-indikator, yaitu keteraturan, kepadatan, dan kelayakan bangunan (Gambar 3). Ketiga indikator tersebut dapat menjelaskan kondisi bangunan yang ada di Kecamatan Pamekasan.



Gambar 3. Diagram Persentase Keteraturan, Kepadatan dan Kelayakan Bangunan

b. Analisa Aksesibilitas Lingkungan

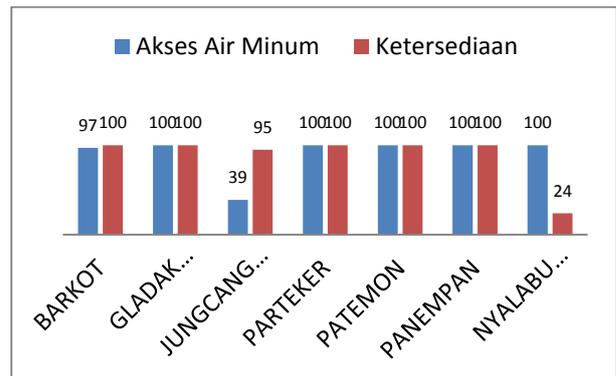
Analisa aksesibilitas lingkungan terlihat pada berapa persen jaringan jalan yang sesuai persyaratan teknis dibandingkan dengan panjang jaringan jalan yang ada dan lebar jalan yang lebih dari 1,5 m (lihat Gambar 4).



Gambar 4. Diagram Persentase Kelayakan Aksesibilitas Lingkungan

c. Analisa Pelayanan Air Minum/Baku

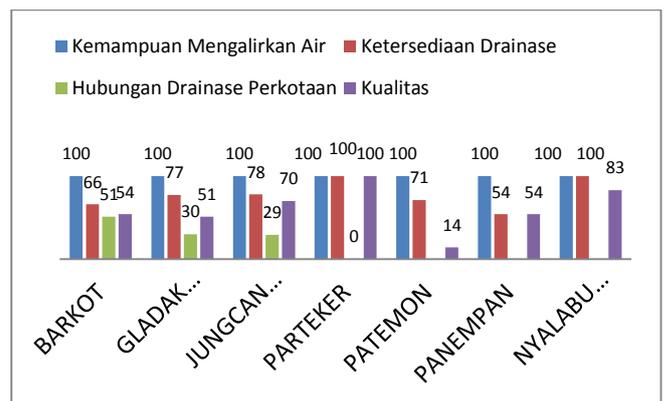
Analisa pelayanan air minum/baku dipengaruhi oleh 2 sub-indikator yaitu terkait dengan penyediaan air minum, mandi, cuci pada masyarakat dan kelayakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat (lihat Gambar 5). Dimana keterpenuhannya masih dipengaruhi oleh kondisi geografis, serta jarak dengan sumber mata air.



Gambar 5. Diagram Persentase Pemenuhan dan Kelayakan Air Bersih

d. Analisa Kelayakan Drainase

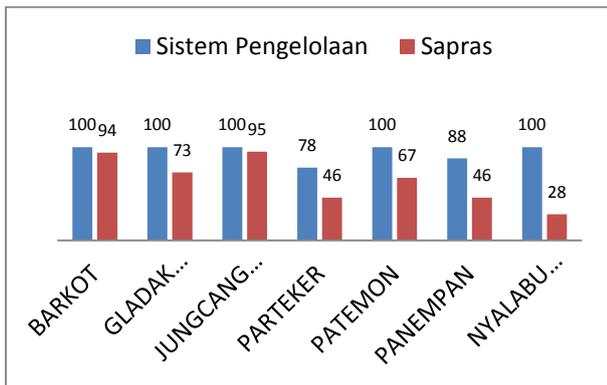
Kondisi drainase lingkungan dilihat berdasarkan intensitas terjadinya genangan dan kualitas minimum yang dimiliki (lihat Gambar 6).



Gambar 6. Diagram Persentase Kelayakan Drainase

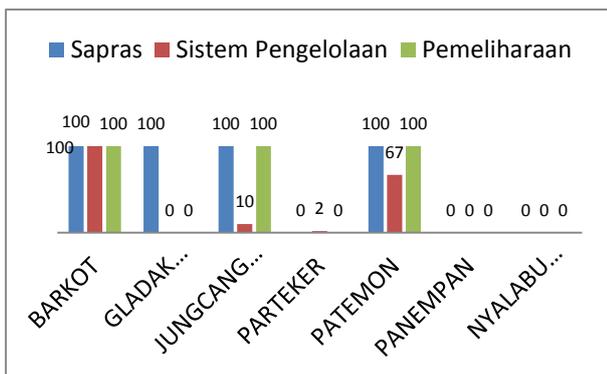
e. Analisa Kelayakan Sanitasi

Analisa pengelolaan sanitasi (air limbah) dilihat berdasarkan ketersediaan akses jamban keluarga/jamban bersama (5 KK/jamban), ketersediaan jamban sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan *septic-tank*), serta adanya saluran pembuangan air limbah rumah tangga yang terpisah dengan saluran drainase lingkungan (lihat Gambar 7). Apabila saluran sanitasi di Kecamatan Pamekasan belum memiliki saluran yang terpisah dengan saluran drainase, maka kondisi ini dapat memberikan dampak pencemaran pada lingkungan dan menimbulkan bau yang tidak sedap.



Gambar 7. Diagram Persentase Kelayakan Sanitasi

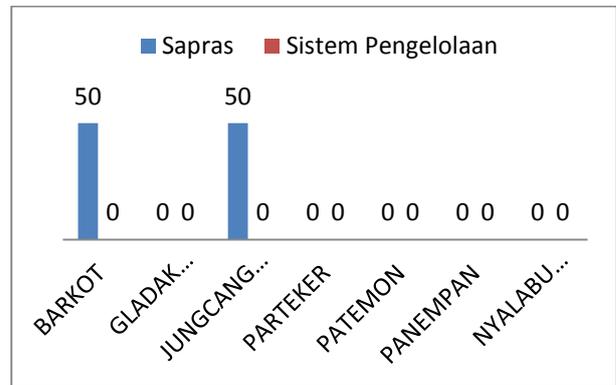
f. Analisa Kelayakan Pengelolaan Sampah
 Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di 7 Kelurahan/Desa hampir 100% sampah domestik rumah tangga belum terangkut ke TPA/TPS, sebagian besar sampah rumah tangga masih diolah dengan cara tradisional, yaitu melalui pembakaran dan juga dibuang ke sungai. Pengangkutan sampah rumah tangga menuju TPS yang optimal hanya dilakukan pada wilayah administrasi kelurahan, sedangkan untuk wilayah administrasi desa masih bersifat tradisional. Persentase kelayakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pamekasan dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Diagram Persentase Kelayakan Pengelolaan Sampah

g. Analisa Keamanan Kebakaran

Berdasarkan pendataan survey yang dilakukan, hampir semua kelurahan/desa belum memiliki sarana pengamanan bahaya kebakaran (lihat Gambar 9).

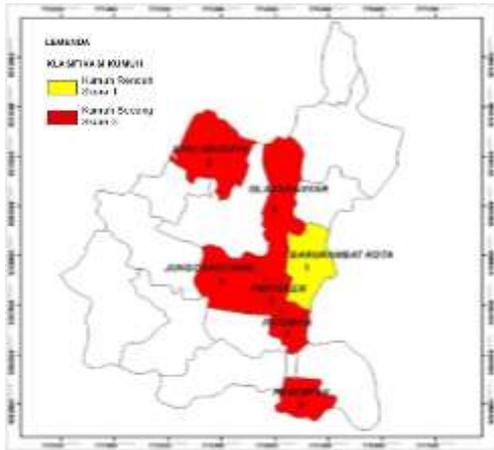


Gambar 9. Diagram Persentase Keamanan Kebakaran

Untuk mengidentifikasi permukiman kumuh pada tiap kelurahan/desa dilakukan dengan sistem skoring di setiap sub-indikator dengan ketentuan sebagai berikut: 25% - 50% skor 5, 51% - 75% skor 3, dan 76% - 100% skor 1. Semua skor dijumlahkan untuk menentukan kriteria kekumuhan meliputi

- Kumuh Tinggi = 71 - 95
- Kumuh Sedang = 45 - 70
- Kumuh Rendah = 19 - 44

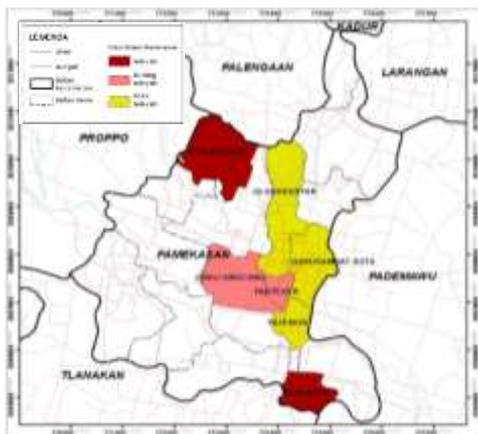
Berdasarkan hasil analisa terhadap 7 indikator kumuh yang terdapat dalam program KOTAKU pada 7 Kelurahan/Desa dapat diketahui bahwa tingkat kekumuhan pada tiap kelurahan/desa berbeda-beda, sebanyak 6 kelurahan/desa teridentifikasi sebagai kawasan dengan tingkat kekumuhan sedang, dan hanya kelurahan Barurambat Kota yang memiliki tingkat kekumuhan ringan. Kondisi kekumuhan ini ditampilkan secara spasial dalam bentuk peta persebaran permukiman kumuh di 7 kelurahan/desa penerima program KOTAKU yang ditampilkan pada Gambar 10.



Gambar 10. Peta Persebaran Permukiman Kumuh di Kelurahan/Desa Penerima Program KOTAKU Kecamatan Pamekasan

3.4 Relevansi Kemiskinan dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil identifikasi persebaran masyarakat miskin dan persebaran permukiman kumuh di 7 kelurahan/desa penerima program KOTAKU, dapat diketahui bahwa terdapat relevansi antara kemiskinan dan permukiman kumuh, sebagaimana ditunjukkan pada peta hasil *overlay* yang dapat dilihat pada Gambar 11.

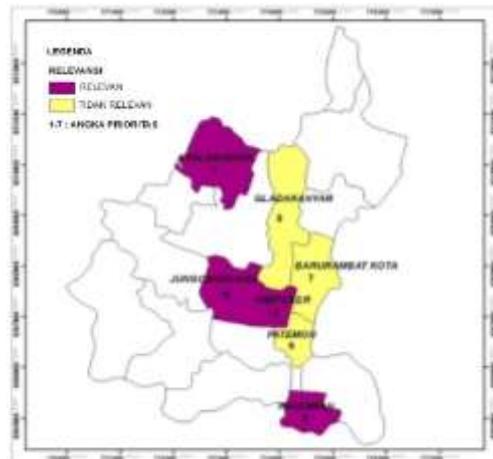


Gambar 11. Peta Hasil *Overlay* Antara Kemiskinan dan Permukiman Kumuh di Kelurahan/Desa Penerima Program KOTAKU Kecamatan Pamekasan

Berdasarkan Gambar 11, dapat diketahui bahwa desa Nyalabu Daya, Desa Panempun, Kelurahan Jungcangcang, dan Kelurahan Parteker merupakan 4 dari 7 kelurahan/desa lokasi penelitian yang

memiliki relevansi antara kemiskinan dan juga permukiman kumuh. Hal ini dapat terlihat dengan kondisi masyarakat mereka yang memiliki penghasilan rendah atau juga disebut masyarakat kurang mampu tinggal pada lingkungan dengan kondisi bangunan yang tidak teratur dan kurang layak, penyediaan air bersih yang kurang, kondisi sanitasi yang minim, kondisi pengelolaan sampah yang tidak layak, kondisi penegolaan drainase yang tidak sesuai layak dan sesuai teknis, serta kondisi pengamanan bahaya kebakaran.

Berdasarkan hasil penjumlahan, semua skor pada sub-indikator permukiman kumuh pada program KOTAKU dan kriteria kemiskinan maka dapat ditentukan skala prioritas pelaksanaan antara lain (1) Desa Nyalabu Daya, (2) Desa Panempun, (3) Kelurahan Parteker, (4) Kelurahan Jungcangcang, (5) Kelurahan Gladak Anyar, (6) Kelurahan Patemon, dan (7) Kelurahan Barurambat Kota (lihat Gambar 12).



Gambar 12. Peta Kelurahan/Desa Prioritas Penerima Program KOTAKU Kecamatan Pamekasan

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengamatan, mengidentifikasi dan menganalisa hasil penelitian yang terjadi di lokasi studi maka Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut (1) Tingkat urbanisasi yang tinggi ditunjang dengan kondisi perekonomian yang rendah menyebabkan masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan dan berpola hidup kurang bersih sehingga mengakibatkan munculnya permukiman kumuh,

(2) Relevansi antara kemiskinan dan permukiman kumuh terjadi apabila desa/kelurahan berada pada kriteria miskin dan juga memiliki kriteria kumuh. Hal ini terdapat pada 4 kelurahan/desa yaitu Desa Nyalabu Daya, Desa Panempun, Kelurahan Jungcangcang dan Kelurahan Parteker, (3) Setiap kelurahan/desa memiliki kriteria dan tingkat kekumuhan yang berbeda sehingga perlu ada prioritas pelaksanaan penanganan permukiman kumuh sehingga pengentasan permukiman kumuh bisa berjalan maksimal, (4) Keterbatasan data KK miskin dari TNP2K sampai tingkat RT yang mengakibatkan penelitian ini kurang detail, harapannya untuk peneliti selanjutnya bisa meneliti sampai tingkat terendah sehingga sasaran kegiatan lebih tepat sasaran (5) Rekomendasi dari penelitian ini perlunya kerjasama antara pemerintah, *stakeholder* dan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara terpadu, sehingga pengentasan kemiskinan dan permukiman kumuh berjalan sesuai target 100-0-100.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Churchill, S. A., & Smyth, R. (2017). Ethnic Diversity and Poverty. *World Development*, 95, 285-302.
- D'souza, V. S. (1979). Socio-cultural Marginality: A Theory of Urban Slums and Poverty in India. *Sociological bulletin*, 28(1-2), 9-24.
- Gregory, I. N., & Healey, R. G. (2007). Historical GIS: Structuring, Mapping and Analysing Geographies of the Past. *Progress in Human Geography*, 31(5), 638-653. doi:10.1177/0309132507081495
- Handler, J. F., & Hasenfeld, Y. (2006). *Blame Welfare, Ignore Poverty and Inequality*: Cambridge University Press.
- Liu, Y., Liu, J., & Zhou, Y. (2017). Spatio-temporal Patterns of Rural Poverty in China and Targeted Poverty Alleviation Strategies. *Journal of Rural Studies*, 52, 66-75.
- Madanipour, A., Shucksmith, M., & Talbot, H. (2015). Concepts of Poverty and Social Exclusion in Europe. *Local Economy*, 30(7), 721-741. doi:10.1177/0269094215601634
- Mubyarto. (2003). *Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*.
- Pemerintah Kabupaten Pamekasan. (2015). *Keputusan Bupati Pamekasan No. 188/545/432.131/2015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh*. Kabupaten Pamekasan: Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- Ramadhan, R. A., & Pigawati, B. (2014). Pemanfaatan Penginderaan Jauh Untuk Identifikasi Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Perkotaan (Studi Kasus: Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning*, 1(2), 102-113.
- Singh, K. (2014). Mapping Poverty to Reach the Urban Poor. *Social Change*, 44(4), 579-591. doi:10.1177/0049085714548542
- Singh, R. (2016). Monitoring Development through GIS Visualisation. *Social Change*, 46(1), 27-45. doi:10.1177/0049085715618557
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- TNP2K. (2017). *Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin* Jakarta: TNP2K.
- Turok, I., & Borel-Saladin, J. (2016). The Theory and Reality of Urban Slums: Pathways-out-of-Poverty or Cul-De-Sacs? *Urban Studies*, 55(4), 767-789. doi:10.1177/0042098016671109
- UN-Habitat. (2004). The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 15(3), 337-338.
- Winayanti, L., & Lang, H. C. (2004). Provision of urban services in an informal settlement: a case study of Kampung Penas Tanggul, Jakarta. *Habitat International*, 28(1), 41-65. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0197-3975(02)00072-3